

Oleh: drh. Imas Yuyun, MSc¹ dan
drh Pebi Purwo Suseno²
¹Medik Veteriner Muda dan ²
Medik Veteriner Madya.
Direktorat Kesehatan Hewan

Peran Fasilitator Masyarakat dalam Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Sosialisasi dan KIE PMK kepada para pedagang di pasar hewan



Sosialisasi dan KIE kepada peternak

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular yang dapat menyebar dengan sangat cepat pada hewan berkuku genap/belah dan mampu melampaui batas wilayah bahkan negara. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku.

Penyakit ini dapat menimbulkan “efek domino” dampak kerugian ekonomi bagi suatu negara akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan serta produk-produknya.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda. Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal. Indonesia dinyatakan sebagai Negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/TN.510/5/1986 dan kemudian diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagaimana tercantum dalam Resolusi OIE Nomor XI Tahun 1990.

Indonesia telah mengidentifikasi risiko terbesar masuknya PMK ke Indonesia adalah melalui importasi/masuknya hewan hidup yang rentan terhadap PMK dan produknya dari negara tetangga yang masih berstatus belum bebas PMK secara ilegal (penyelundupan) maupun dibawa oleh penumpang yang berasal dari

negara/daerah tertular. Selain itu, wabah ini juga dapat menyebar melalui sisa makanan dari pesawat dan juga kapal laut, terkait dengan praktik pemberian makanan sisa (swill feeding) ke hewan terutama babi.

Hal itu terbukti dengan adanya wabah PMK di Indonesia pada bulan Mei 2022 di Jawa Timur dan Aceh yang kemudian menyebar ke 25 provinsi di Indonesia. Penyebaran secara cepat ini terjadi karena lalu lintas hewan dan produknya, kendaraan dan benda yang terkontaminasi virus PMK. Untuk mengurangi dampak dan meminimalkan penyebaran PMK, maka diperlukan kemampuan deteksi dan diagnosa PMK yang cepat serta pengendalian lalu lintas hewan rentan dan produknya ke daerah lain yang masih bebas.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022. Pemerintah menerapkan lima langkah strategi kebijakan dalam menanggulangi wabah PMK ini meliputi: 1) Penerapan biosekuriti yang ketat; 2). Pengobatan bagi hewan ternak yang telah terinfeksi PMK; 3) Vaksinasi terhadap hewan; 4) Pemoangan sesuai persyaratan penanganan PMK pada hewan terpapar PMK dan 5) Pengujian (testing).

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia, Pemerintah

kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK (Satgas PMK) yang melibatkan unsur kesehatan hewan, BNPB, TNI/Polri dan unsur lain yang terlibat dalam penanganan PMK di lapangan. Satgas PMK ditingkat nasional dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di tingkat pusat, Satuan tugas ini melibatkan Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya dalam penyusunan program pengendalian PMK secara nasional di lapangan.

Salah satu program Satgas PMK adalah melakukan diseminasi informasi tentang pencegahan penyebarluasan PMK kepada seluruh stakeholder peternakan di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan teknis (Bimtek) Fasilitator penanganan PMK ini dilaksanakan di 20 Provinsi tertular PMK di Indonesia. Bimtek ini dilaksanakan dengan jumlah peserta 100 orang/provinsi yang berasal dari perwakilan Koramil, Perwakilan Polsek, unsur Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh pertanian/peternakan, Babhinkamtibmas, Babinsa, perwakilan peternak, relawan dan asosiasi peternakan. Pada saat ini telah terbentuk 100 orang Fasilitator di tiap Provinsi tertular yang ditargetkan untuk dapat mensosialisasikan pencegahan dan penanganan PMK ke 900.000 keluarga peternak di 20 provinsi di Indonesia yang teridentifikasi di awal wabah sebagai provinsi tertular yaitu Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Para fasilitator di 20 provinsi dibekali empat materi utama yaitu terkait Pengenalan Penyakit Mulut dan Kuku, Strategi nasional percepatan pengendalian PMK, Pelaporan dan dukungan logistik, dan Teknik fasilitasi. Untuk materi strategi nasional percepatan pengendalian PMK yang diberikan adalah tentang pemahaman dasar tentang Vaksinasi, Biosekuriti, pemotongan bersyarat dan pengujian PMK. Hal ini sejalan dengan program pengendalian dan penanggulangan PMK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Fasilitator juga memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan PMK, kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi penanganan PMK di wilayah masing-masing.

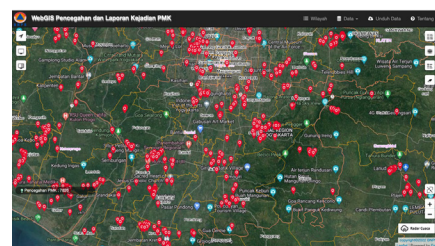
Materi untuk fasilitator disampaikan bersama narasumber dari Kementerian Pertanian, BNPB, Satgas PMK, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dokter Hewan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Satgas PMK, Akademisi dan BPSDM Provinsi.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan bimtek adalah calon fasilitator yang heterogen sehingga perlu pendekatan khusus dalam menjelaskan istilah-istilah teknis terkait pengendalian dan penanggulangan PMK. Selain melakukan sosialisasi tentang pengendalian dan penanggulangan PMK dasar kepada keluarga atau peternak terdekat di wilayah kerjanya sehingga diharapkan berkontribusi dalam mencegah penyebaran PMK lebih lanjut, fasilitator juga

dilatih untuk melakukan pelaporan kegiatan sosialisasi melalui platform



Praktek Fasilitasi KIE PMK



Titik pelaporan para fasilitator hingga ke tingkat desa (Sumber BNPB)

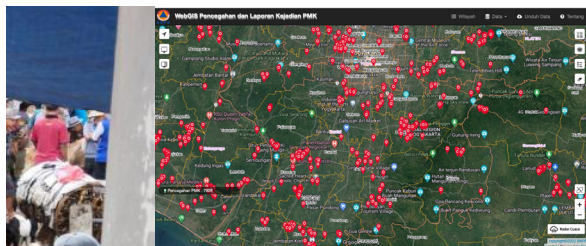


Sosialisasi dan KIE kepada peternak di pasar hewan

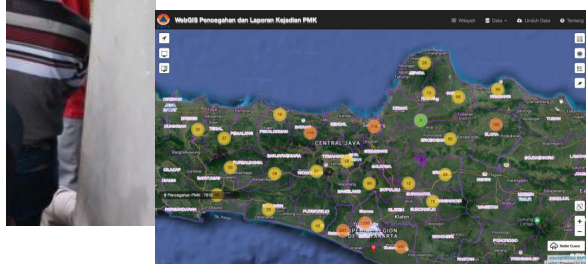
InaRisk (milik BNPB) secara *real time* dengan mengunduh aplikasi tersebut terlebih dahulu. Waktu sosialisasi penanganan PMK diberikan selama 1 bulan. Pelaporan juga dilakukan dengan melampirkan bukti foto saat sosialisasi yang menunjukkan waktu dan tempat kegiatan.



Sosialisasi dan KIE kepada peternak di kantor desa



Titik pelaporan para fasilitator hingga ke tingkat desa (Sumber BNPB)



Titik pelaporan para fasilitator hingga ke tingkat desa (Sumber BNPB)

Dalam pelaksanaannya, para fasilitator tersebut mayoritas melakukan sosialisasi di rumah peternak, kelompok ternak, kantor desa, kantor Koramil, pasar hewan dan lokasi lainnya sambil

melaksanakan tugas pokok sehari-hari. Setiap fasilitator dibekali dengan media KIE seperti poster, leaflet dan stiker tentang PMK, sehingga dapat memudahkan dalam menjelaskan kepada target sosialisasi atau masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi dari beberapa fasilitator, masyarakat yang menjadi target sosialisasi KIE PMK merasa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mencegah penyebaran PMK di lapangan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami cara penularan dan cara pencegahan PMK agar tidak menyebar ke wilayah lain. Cara pencegahan yang paling penting adalah dengan penerapan biosekuriti dan vaksinasi pada ternak

sehat. Kegiatan sosialisasi PMK oleh fasilitator ini memiliki dampak positif juga dalam meringankan beban kerja petugas Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah, mengingat petugas Dinas di lapangan cukup terbatas untuk melakukan penyuluhan sehingga diperlukan bantuan dengan melibatkan unsur lain dalam penanggulangan PMK di lapangan. Penulis juga berpendapat bahwa kegiatan ini perlu dilanjutkan karena berdampak positif bagi masyarakat dan dunia peternakan di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat diadopsi dan didukung oleh Pemerintah pusat maupun daerah dan dapat dikembangkan untuk program pengendalian penyakit lainnya.







Sejarah Penyakit JEMBRANA



1997 – 2000

Pengembangan vaksin



2004 - 2010

Penelitian fase I
ditemukannya seed sub unit rekombinan Virus Penyakit Jembrana yang dapat digunakan sebagai vaksin dan antigen untuk Kit diagnostik.

Penelitian fase 2
Menyimpulkan target sel dari virus Jembrana (JDV) berhasil diungkap bahwa bahwa Penyakit Jembrana adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh sekaligus memperjelas gambaran Patogenesis Penyakit Jembrana.